



djp

LAPORAN KINERJA

2024

KPP Madya Dua
Jakarta Utara



Daftar Isi

Daftar Isi	02
Daftar Tabel	03
Daftar Diagram	04

Bab 1

Pendahuluan

A.1 Kedudukan	05
A.2 Tugas Pokok dan Fungsi	05
A.3 Struktur Organisasi	06
B. Sumber Daya Manusia	08
C. Mandat yang Diberikan	10
D. Peran Strategis	10
E. Kekuatan Sumber Daya	11
F. Permasalahan Utama	11
G. Sistematika Laporan	12

Bab 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Ikhtisar Kontrak Kinerja	16

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
3.3 Akuntabilitas Keuangan	27

Bab 4

Penutup

Penutup	39
---------	----

Daftar Tabel

B.1	SDM Berdasarkan Penempatan Seksi	08
B.2	SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan	09
B.3	SDM Berdasarkan Jabatan	09
B.4	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
C	Rincian Jenis Pajak yang diberikan kepada KPP Madya Dua Jakarta Utara	10
2.2.1	Perspektif & Sasaran Strategis	16
2.2.2	Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama	17
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	19

Daftar Diagram

D.1	Jenis Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara	11
------------	---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Singkat (Tupoksi, Kedudukan dan Struktur Organisasi)

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, KPP Madya Dua Jakarta Utara sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, menggantikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dan mulai efektif beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021. KPP Madya Dua Jakarta Utara memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah di Jakarta Utara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, KPP Madya Dua Jakarta Utara mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPP Madya Dua memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak dan masyarakat;
- f. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

- i. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

KPP Madya Dua Jakarta Utara dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020. Susunan organisasi KPP Madya Dua Jakarta Utara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi V; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan perincian tugas dan fungsi Subbag/Seksi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV

Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan

perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada bidang Sumber Daya Manusia, KPP Madya Dua Jakarta Utara didukung oleh sumber daya manusia dengan total 117 pegawai per 31 Januari 2025, yang komposisinya dapat digambarkan dalam table-tabel berikut.

1. SDM Berdasarkan Penempatan Seksi

Seksi	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	11
Seksi Pelayanan	18
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	10
Seksi Penjamin Kualitas Data	4
Seksi Pengawasan I	7
Seksi Pengawasan II	7
Seksi Pengawasan III	7
Seksi Pengawasan IV	8
Seksi Pengawasan V	8
Seksi Pengawasan VI	7
Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	29

Tabel B.1 Tabel SDM Berdasarkan Penempatan Seksi

2. SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai
Pembina Utama Muda/IVc	2
Pembina Tk.I/IVb	5
Pembina/IVa	12
Penata Tk.I/III d	18
Penata/IIIc	12
Penata Muda Tk.I/III b	18
Penata Muda/IIIa	7
Pengatur Tk.I/II d	4
Pengatur/IIc	4
Pengatur Muda Tk.I/II b	21
Pengatur Muda/IIa	5

Tabel B.2 Tabel SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

3. SDM Berdasarkan Jabatan

Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1
Kepala Seksi	9
Pemeriksa Pajak	30
Account Representative	27
Penilai Pajak Ahli Muda	1
Penilai Pajak Ahli Pertama	1
Penyuluh Pajak Ahli Muda	1
Penyuluh Pajak Ahli Pertama	2
Asisten Penyuluh Pajak Mahir	1
Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	1
Bendaharawan	1
Sekretaris	1
Juru Sita	2
Pelaksana	27

Tabel B.3 Tabel SDM Berdasarkan Jabatan

4. SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
Diploma I	26
Diploma III	15
Diploma IV/Sarjana	40
Magister	25

Tabel B.4 Tabel SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

C. Mandat yang Diberikan kepada KPP Madya Dua Jakarta Utara

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengemban penerimaan negara, KPP Madya Dua Jakarta Utara sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak secara langsung mendapat mandat mengumpulkan dana bagi pembiayaan negara. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, besarnya beban yang diberikan kepada KPP Madya Dua Jakarta Utara pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp 15,440,032,210,000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
PPh Non Migas	5.834.060.725.000
PPN dan PPnBM	8.825.715.935.000
Pajak Lainnya	5.646.014.000

Tabel C Tabel Rincian Jenis Pajak yang diberikan kepada KPP Madya Dua Jakarta Utara

Untuk melaksanakan mandat yang dibebankan tersebut, KPP Madya Dua Jakarta Utara bekerja berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Peran Strategis KPP Madya Dua Jakarta Utara

Selama periode tahun 2023, KPP Madya Dua Jakarta Utara telah:

1. Mengadministrasikan sejumlah **1.340 wajib pajak** dengan rincian **1.209 Wajib Pajak Badan dan 131 Wajib Pajak Orang Pribadi**.



Diagram D.1 Diagram Jenis Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara

2. Mengamankan penerimaan negara sebesar **Rp 15,449,861,613,100,-** dari target sebesar **Rp15,440,032,210,000** , - atau **100,06%** dari target penerimaan tahun 2024.

E. Kekuatan Berbagai Sumber Daya yang Ada

Sumber daya yang dapat dijadikan dasar pencapaian penerimaan Pajak terdiri atas pihak internal dan eksternal. Dari sisi internal KPP Madya Dua Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 117 orang pegawai yang bekerja dengan penuh komitmen dan tanggung jawab;
2. Pencapaian penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp 15,449,861,613,100 , -
3. Tersedianya sarana berupa gedung, komputer, sistem informasi perpajakan, kendaraan dinas dan sarana lainnya yang menunjang kelancaran pekerjaan;
4. Bimbingan dan koordinasi yang baik antara KPP Madya Dua Jakarta Utara dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara sebagai instansi vertikal di atasnya;

Dari sisi eksternal bahwa terdapat iklim nasional yang kondusif atas pentingnya pajak bagi pembangunan seiring kampanye perpajakan nasional yang gencar oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi vertikal dibawahnya baik melalui televisi maupun media komunikasi lainnya.

F. Permasalahan Utama

Target Penerimaan Perpajakan dalam APBN 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun atau 82.06% terhadap target Pendapatan Negara yang berjumlah Rp2.307,9 triliun. Pada tahun 2024, KPP

Madya Dua Jakarta Utara ditugaskan untuk mengamankan target penerimaan sebesar **Rp15,440,032,210,000,-**. Target sebesar itu menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Madya Dua Jakarta Utara. Selain harus mengamankan target penerimaan tersebut, KPP Madya Dua Jakarta Utara juga menghadapi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, di antaranya:

1. Kegiatan ekspor dan impor yang cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023
2. Besarnya restitusi sehingga menekan penerimaan neto tahun 2024
3. Target Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang tumbuh cukup signifikan dibandingkan tahun 2023
4. Ada sejumlah Wajib Pajak yang tidak bisa dihubungi dan/atau berstatus pailit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya

G. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja bila ada.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran serta Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV Penutup

Lampiran Kontrak Kinerja Kepala KPP Madya Dua Jakarta Utara Tahun 2023

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPP Madya Dua Jakarta Utara Tahun 2024, diharapkan aparat KPP Madya Dua Jakarta Utara semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya atas sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai. Selain itu diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul.

Sesuai dengan SE-447/PJ/2000 perihal sosialisasi dan tindak lanjut penerapan visi, misi, strategi dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor: 62/PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP Madya Dua Jakarta Utara, didalam menyusun Visi, Misi, dan Renstra yang sama dengan Renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan Visi dan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Visi :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Misi :

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

2.1.2. Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, maka KPP Madya Dua Jakarta Utara sebagai bagian dari DJP dan Kemenkeu dalam upaya mendukung peningkatan kinerja harus berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang merupakan dasar dan pedoman seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap. Adapun Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Integritas : Yang mengandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral.
- (2) Profesionalisme : Yang mengandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai dalam bekerja harus melakukannya dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- (3) Sinergi : Yang mengandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai harus memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- (4) Pelayanan : Yang mengandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai dalam memberikan pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan mudah.
- (5) Kesempurnaan : Yang mengandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

2.1.3. Tujuan KPP

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk memberikan arah dan langkah-langkah yang akan diambil tersebut, maka terlebih dahulu disusun suatu tujuan yang ingin dicapai oleh KPP Madya Dua Jakarta Utara.

Tujuan yang ingin dicapai oleh KPP Madya Dua Jakarta Utara adalah *"Mengamankan pencapaian target penerimaan pajak dengan melakukan koordinasi*

dan sinergi antar seksi-seksi di lingkungan KPP Madya Dua Jakarta Utara untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak".

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau suatu hal, secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sedangkan Strategi/Strategis adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mengimplementasikan Sasaran Strategis tersebut, KPP Madya Dua Jakarta Utara mengacu pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak yang digambarkan kedalam 4 (empat) perspektif sebagai berikut :

(1) Stakeholder Perspektif

Perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai berikut: "apa yang harus dicapai organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder". Artinya agar dinilai berhasil, maka KPP Madya Dua Jakarta Utara harus dapat mencapai target penerimaan pajak yang optimal.

(2) Customer Perspektif

Perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai berikut: "apa yang harus dicapai organisasi agar memenuhi keinginan customer atau apa yang diinginkan customer untuk dipenuhi organisasi". Artinya agar dinilai berhasil, maka KPP Madya Dua Jakarta Utara harus dapat meningkatkan kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan.

(3) Internal Process Perspektif

Perspektif ini adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi. Artinya agar dinilai berhasil, maka KPP Madya Dua Jakarta Utara harus dapat mengoptimalkan proses internal dalam rangka menciptakan produksi yang optimal untuk memenuhi keinginan stakeholder atau Wajib Pajak.

(4) Learning and Growth

Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan penguatan sumber daya internal organisasi. Artinya agar dinilai

berhasil, maka KPP Madya Dua Jakarta Utara harus dapat meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung tercapainya tujuan kantor.

2.2. Ikhtisar Kontrak Kinerja 2023

2.2.1. Sasaran Strategis (SS)

Kebijakan Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Jakarta Utara dalam upaya mencapai tujuannya tertuang dalam 11 Sasaran Strategis (SS) yang dikelompokkan kedalam 4 Perspektif sebagai berikut :

No.	Perspektif	Sasaran Strategis
1.	Stakeholder Perspektive	1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
2.	Customer Perspektive	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3.	Internal Process Perspektive	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif 5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif 6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif 7. Penegakan hukum yang efektif 8. Data dan informasi yang berkualitas
4.	Learning & Growth Perspektive	9. SDM yang kompeten
		10. Organisasi yang berkinerja tinggi
		11. Penguatan Pengelolaan anggaran yang optimal

Tabel 2.2.1 Perspektif & Sasaran Strategis

2.2.2. Program Kerja

Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, maka yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai alat ukur bagi pencapaian SS pada KPP Madya Dua Jakarta Utara tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1. Persentase realisasi penerimaan pajak 2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	3. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis 4. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 7. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	8. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif	9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

	10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
7. Penegakan hukum yang efektif	11. Tingkat efektivitas Pemeriksaan 12. Tingkat Efektivitas Penagihan 13. Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan
8. Data dan informasi yang berkualitas	14. Persentase penyelesaian laporan pengamatan
9. SDM yang kompeten	15. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
10. Organisasi yang berkinerja tinggi	16. Indeks Penilaian Integritas Unit 17. Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko
11. Penguatan Pengelolaan keuangan yang optimal	18. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 2.2.2 Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Keuangan sebagai representasi pengelolaan Kinerja berbasis *Balanced Score Card (BSC)*. Dalam konsep BSC, visi dan misi yang telah diformulasikan dalam rencana strategis selanjutnya diterjemahkan dalam sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut dipetakan ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta strategi memudahkan organisasi untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Secara teknis dilakukan Pengukuran Kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor : 62/PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Dua Jakarta Utara telah menyelenggarakan sistem administrasi modern.

Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap kinerja KPP Madya Dua Jakarta Utara selama kurun waktu Tahun 2024, dalam hal pengelolaan kinerja berbasis Balance Score Card (BSC) diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	96,65
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							96,65
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	91,99	Max	P/L	19,00%	42,22%	91,99
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,45
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,81
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	118,49%	Max	P/L	19,00%	42,22%	118,49
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,09
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,09%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,09
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,96
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,80
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,59%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,59
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	118,25%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,33
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,99%	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,99
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	119,56%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,87
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,74
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,32
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,86
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,96	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	100,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,35

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja :

Berikut ini akan diberikan penjelasan atas pencapaian setiap IKU dari berbagai sasaran strategis yang ditetapkan KPP Madya Dua Jakarta Utara untuk tahun 2024.

1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 15,449,861,613,100,- dari target tahun 2024 yang harus dicapai sebesar Rp 15,440,032,210,000 ,- sehingga dapat direalisasikan dengan tingkat pencapaian **100.06%**. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak tahun 2024 telah memenuhi target IKU tahun 2024 sebesar **100%**. Pencapaian target kinerja didukung dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan, yaitu:

- Menerbitkan Surat Teguran, STP dan P4DK
- Menindaklanjuti Data Matching/LHA
- Melakukan penelitian/perhitungan kembali pembayaran angsuran 25
- Melakukan Visit
- Melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap SP2DK komprehensif dan tahun berjalan yang sudah dikeluarkan
- Melakukan himbauan, konfirmasi, klarifikasi, atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau pihak terkait, serta laporan tindak lanjut Surat Himbauan, konfirmasi, klarifikasi, atau permintaan keterangan kepada Wajib

Pajak atau pihak terkait.

1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: (1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan (2) Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dihitung dengan formula $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$

Pada Tahun 2024, Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Madya Dua Jakarta Utara adalah **91.99** dari target 2024 yaitu sebesar **100**. Sehingga dengan indeks capaian ini, maka status capaian IKU adalah belum tercapai.

2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

Realisasi SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak badan dan orang pribadi tahun 2024 sebanyak 1.240 SPT dari target sebanyak 1.055 WP Wajib SPT sehingga dicapai tingkat kepatuhan formal WP sebesar 118.49%.

Hal ini menunjukkan bahwa Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **118.49%**, yang artinya sudah mencapai target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100,00%**.

Pencapaian target kinerja didukung dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan, yaitu:

- Menghubungi Wajib Pajak via telepon
- Melakukan visit
- Melakukan himbauan secara persuasif terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikn SPT Tahunan PPh
- Menerbitkan Surat Teguran terhadap WP yang belum menyampaikn SPT

Tahunan PPh

- Melakukan SMS Blast

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **100%**, yang artinya lebih besar 0% dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100%**.

Pencapaian target kinerja didukung dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan, yaitu:

- Menerbitkan Surat Teguran
- Menindaklanjuti Data Matching/LHA
- Melakukan penelitian/perhitungan kembali pembayaran angsuran 25
- Melakukan pengawasan pembayaran masa
- Menerbitkan STP dan P4DK
- Melakukan Visit
- Melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap SP2DK komprehensif dan tahun berjalan yang sudah dikeluarkan
- Melakukan himbauan, konfirmasi, klarifikasi, atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau pihak terkait, serta laporan tindak lanjut Surat Himbauan, konfirmasi, klarifikasi, atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau pihak terkait.

3. Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan Triwulan IV-2024 telah mencapai **101.09%**, yang artinya lebih 1.09% dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100%**. Adapun hambatan yang dihadapi dalam mencapai target seperti :

- Target PKM yang terlampaui tinggi dibanding tahun sebelumnya

- Menurunnya kegiatan impor karena Wajib Pajak KPP Madya Dua didominasi oleh Wajib Pajak Sektor Perdagangan dalam hal ini wajib pajak importir

4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **88.80%**, yang artinya lebih besar **14.80%** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **74%**.

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **107.59** yang artinya lebih besar **7.59** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100**.

5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **118.25%**, yang artinya lebih besar **18.25%** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100,00%**.

Pencapaian target kinerja didukung dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan, yaitu:

- Melakukan penerbitan STP berdasarkan target dafnom yang diturunkan oleh Kanwil
- Melakukan penelitian dan menerbitkan himbauan dinamisasi PPh pasal 25
- Penerbitan STP Masa PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPN dan PPnBM, PPh 25 dan PP 23
- Melakukan tindak lanjut terkait data matching yakni data pemicu tahun 2023 yang terdapat pada aplikasi Approweb

6. Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengawasan kepatuhan material yang efektif

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangann WP Strategis sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **120%**, yang artinya lebih besar **20%** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100%**.

Pencapaian target kinerja didukung dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan, yaitu:

- Melakukan penerbitan LHPT dan SP2DK Komprehensif
- Menindaklanjuti SP2DK Komprehensif yang masih open / outstanding
- Menindaklanjuti surat himbauan dengan penerusan ke proses pemeriksaan dan atau Usulan Bukper
- Melakukan pengawasan pembayaran Masa dan Tahunan
- Menghubungi Wajib Pajak untuk dilakukan konseling

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **120%**, yang artinya lebih besar **20%** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100%**.

7. Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan Hukum yang Efektif

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Tingkat efektivitas pemeriksaan

Persentase efektivitas penagihan sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **120%**, yang artinya lebih besar **20%** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100%**.

Adapun hal yang telah dilakukan dan pelaksanaan rencana aksi dalam memenuhi Efektivitas Pemeriksaan adalah dengan Memperkuat kembali rapat Komite Kepatuhan untuk lebih seksama dalam mengusulkan Riksus dan memaksimalkan Permintaan usulan Riksus di tiap Pengawasan.

7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Tingkat efektivitas penagihan

Persentase efektivitas penagihan sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **119.56%**, yang artinya lebih besar **44.56%** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **75%**.

Adapun hal yang telah dilakukan dan pelaksanaan rencana aksi dalam memenuhi Efektivitas Penagihan adalah dengan Menerbitkan Surat Teguran. Menyampaikan

Surat Paksa, Melaksanakan Pemblokiran Rekening, Menerbitkan dan melaksanakan SPMP/Sita, Melakukan Penjualan Barang Sitaan melalui Pemindahbukuan, dan Melakukan Pencegahan terhadap Wajib Pajak.

7.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan

Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **100%**, yang artinya lebih besar 0% dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100%**.

8. Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan informasi yang berkualitas

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase penyelesaian laporan pengamatan

Persentase penyelesaian laporan pengamatan sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **120%**, yang artinya lebih besar **20%** lebih besar dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100%**.

9. Sasaran Strategis (SS) 9 : SDM yang Kompeten

9.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **117.32%**, yang artinya lebih besar **17.32%** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **100%**.

Adapun hal yang telah dilakukan dan pelaksanaan rencana aksi dalam memenuhi Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar adalah dengan Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai untuk ujian baik Assessment maupun Uji Kompetensi.

10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Organisasi yang Berkinerja Tinggi

10.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks Penilaian Integritas Unit

Persentase indeks penilaian integritas unit sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai skala **95.93**, yang artinya lebih besar **12.93** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **83**.

Adapun hal yang telah dilakukan dan pelaksanaan rencana aksi dalam memenuhi Indeks Penilaian Integritas Unit adalah dengan:

- Menentukan Wajib Pajak yang akan dilakukan survei Penilaian integritas Unit
- Memastikan Wajib Pajak telah mendapatkan email terkait survei Penilaian

Integritas Unit

- Memastikan Wajib Pajak telah mengisi survei Penilaian Integritas Unit

10.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko

Persentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan rencana mitigasi risiko sampai dengan Triwulan IV-2023 mencapai **99,96%**, yang artinya lebih besar **9,96%** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2023 sebesar **90,00%**.

Adapun hal yang telah dilakukan dan pelaksanaan rencana aksi dalam memenuhi Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan adalah dengan:

- Menjadwalkan pelaksanaan DKO pada minggu pertama bulan Januari, April, Juli dan Oktober
- Menyusun dokumen Manajemen Risiko UPR
- Mengimplementasikan rencana aksi mitigasi risiko triwulanan
- Membuat Laporan Capaian Kinerja
- Melaksanakan Rapat DKO
- Membuat Risalah Rapat
- Melakukan Monitoring Rencana Aksi

11. Sasaran Strategis (SS) 11 : Pengelolaan Keuangan yang Optimal

11.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan IV-2024 mencapai **100** yang artinya lebih besar **9%** dari target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan IV-2024 sebesar **91**.

Adapun hal yang telah dilakukan dan pelaksanaan rencana aksi dalam memenuhi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah dengan Revisi, Optimalisasi, dan Penghematan Anggaran.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Madya Dua Jakarta Utara diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan

yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara.

KPP Madya Dua Jakarta Utara selalu berupaya untuk menegakkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*. Pembagian wewenang dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang–Undang yang berlaku. Transparansi dan Independensi pengelola keuangan merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan di KPP Madya Dua Jakarta Utara sudah dijalankan dengan bersih dan jujur. Tidak terlepas juga dengan prinsip kinerja yang memadai yaitu efektif, efisien dan ekonomis.

Selama tahun 2024, jumlah pagu anggaran untuk membiayai program KPP Madya Dua Jakarta Utara adalah sebesar **Rp 5.638.506.000,-**. Dari jumlah tersebut, realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar, **Rp 5.299.528.660,-** sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Madya Dua Jakarta Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2016), maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 atas nama KPP Madya Dua Jakarta Utara.

Secara umum pencapaian pelaksanaan kinerja KPP Madya Dua Jakarta Utara dapat dikatakan mencapai kategori Baik dengan Nilai Kinerja Organisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 108.35% dengan pencapaian target penerimaan pajak sebesar 100.06% dari rencana (realisasi sebesar Rp 15,449,861,613,100,- sedangkan rencana sebesar Rp 15,440,032,210,000,-).

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) pada KPP Madya Dua Jakarta Utara Tahun 2023, dan untuk dapat mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Pajak, maka harapan ke depan adalah membekali Nilai-Nilai Kementerian Keuangan terhadap sumber daya yang ada atau aparat pajak di lingkungan KPP Madya Dua Jakarta Utara, terutama dalam penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan modern di KPP Madya Dua Jakarta Utara untuk menunjukkan diri sebagai Kantor Pelayanan Publik yang profesional, terpercaya serta meningkatkan citra DJP. Tentunya, dengan penerapan sistem baru tersebut dapat mewujudkan kemampuan profesionalisme dari sumber daya yang ada atau aparat pajak di lingkungan KPP Madya Dua Jakarta Utara, sehingga harapan untuk dapat terpenuhinya penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terwujud serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat tercapai.

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka LAKIN KPP Madya Dua Jakarta Utara tahun anggaran 2024 telah selesai disusun dan semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas kegiatan di tahun 2025.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya
Dua Jakarta Utara



Ditandatangani secara elektronik
Saefudin